

Editor:
Ade M Wirasenjaya
Masyitoh Annisa Ramadhani



The Phoenix Press



BUNGA RAMPAI

CINA DAN INDONESIA
DALAM DINAMIKA
POLITIK GLOBAL
KONTEMPORER

KUMPULAN TULISAN DOSEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Daftar Isi

Daftar Isi.....	v
Pengantar Singkat Editor	vii
BAGIAN I :	
Nilai-Nilai Dasar Diplomasi Cina dan Indonesia.....	1
1. Neo Konfusianisme dan Pemberantasan Korupsi di Cina	3
→ <i>Djumadi Anwar</i>	
2. Building Peace Through Islamic-Based Ethics.....	17
→ <i>Surwandono</i>	
3. Chinese Nationalism in the Ip Man (葉問) Film: Indonesia Views	25
→ <i>Ali Maksum</i>	
4. Esensi Hubungan Internasional dalam Islam.....	33
→ <i>Sidiq Ahmadi</i>	
BAGIAN II :	
Strategi Cina dan Indonesia dalam Dunia yang Berubah	41
1. Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Isu Separatisme dan Irredentisme.....	43
→ <i>Sidik Jatmika</i>	

2. Doktrin Xi Jinping dan Haluan Baru Politik Luar RRC	57
→ <i>Ali Muhammad</i>	
3. Dukungan Cina Terhadap Korea Utara	63
→ <i>Sugeng Riyanto</i>	
4. Peluang Etnis China-Muslim dalam Kontestasi Politik di Indonesia	71
→ <i>Takdir Ali Mukti</i>	
5. China Abad Ke-21: Ancaman Atau Alternatif Kapitalisme Global?	83
→ <i>Grace Lestariana Wonoadi</i>	
6. China, Revolusi Toilet dan "Globalisasi dari Atas" ..	95
→ <i>Ade M Wirasenjaya</i>	

BAGIAN III :

Tantangan Non- Tradisional Cina dan Indonesia	107
1. The Progress of Gender Equality Norm In China and Its Integration into China Foreign Policy	109
→ <i>Nur Azizah</i>	
2. Problem Efektivitas Diplomasi Bencana: Belajar dari Pengalaman Hubungan Cina dan Jepang	121
→ <i>Ratih Herningtyas</i>	
3. Hitam Putih Diplomasi Panda Tiongkok	133
→ <i>Wahyuni Kartikasari</i>	
4. The Internationalization Opportunities For Muhammadiyah Education in China	151
→ <i>Imam Mahdi</i>	

5. Upaya Rekonsiliasi Nir Kekerasan Tiongkok
↳ Pasca Peperangan dengan Jepang 157
→ *Idham Badruzaman*

Peluang Etnis China-Muslim dalam Kontestasi Politik di Indonesia

Takdir Ali Mukti¹

Pendahuluan

Komunitas China-Muslim dalam konteks sosial di Indonesia sering dilabeli sebagai *'the double minorities'*. Hal ini disebabkan karena dilihat dari struktur majemuk masyarakat Indonesia, China-Muslim memiliki dua karakter sebagai minoritas, yakni, pertama, sebagai minoritas etnis China di tengah etnis-etnis dominan seperti Jawa, Melayu dan Sunda; dan, kedua, sebagai minoritas Muslim di tengah etnis China yang didominasi oleh umat Budha dan Nasrani. Posisi kaum China-muslim sebagai minoritasnya kaum minoritas ini, sebagaimana diteliti oleh Teguh Setiawan, secara empirik terdapat gangguan hubungan sosial di antara etnis Tionghoa itu sendiri, sebagaimana

¹ Pengajar Mata Kuliah Hukum Internasional dan Diplomasi di Jurusan HI UMY. Fokus studinya pada isu paradiplomasi dan sudah menulis buku "Paradiplomasi: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia (2014)". Saat ini sedang menyelesaikan studi doktor di UMY.

terlihat dalam corak kohesifitas hubungan sosial antara China-Muslim dengan China-Mayoritas yang non muslim tampak ada kerenggangan, demikian pula pada hubungan yang lebih serius seperti hubungan ekonomi yang kasat mata sekali bahwa kontinuitas koneksitas etnis China di Indonesia yang secara massive menguasai jaringan ekonomi nasional harus dicekualikan bagi China-Muslim ini (Setiawan; 2012).

Posisi kaum China-Muslim di mata etnis China mayoritas yang bisa dikatakan 'kurang beruntung' itu, dari perspektif yang berbeda dapat dilihat adanya potensi lain yang tidak dimiliki oleh etnis China dominan, yang apabila potensi itu dikelola dengan komunikasi sosial yang baik justru dapat dipandang sebagai sebuah kekuatan. Sisi potensial itu muncul dari karakteristik relasi sosial atau pembauran kaum China-Muslim yang cenderung lebih bisa diterima di kalangan mayoritas masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, serta sebagian besar di Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat yang masyarakatnya mayoritas muslim. Potensi relasi sosial ini tentu dapat menjadi modal politik yang sangat strategis bagi kaum China-Muslim untuk mengambil peran yang lebih besar di tengah masyarakat Indonesia, yakni dengan turut berkontestasi di ranah politik, baik lokal maupun nasional.

Beranjak dari modal sosial-politik yang dimiliki tersebut, tulisan ini berupaya untuk melihat peluang kaum China-Muslim dalam kontestasi politik di Indonesia dewasa ini yang telah memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap warga negara.

Bangkitnya Partisipasi Politik Etnis China

Pasca reformasi, muncul berderet regulasi yang memulihkan hak-hak kewarganegaraan etnis Tionghoa yang selama hampir 60 tahun sejak Indonesia merdeka tersandera oleh sejarah. Pemulihan hak politik menjadi salah satu yang paling monumental selain penghapusan label-label sosial yang bernuansa diskriminasi mulai dari keluarnya Instruksi Presiden Habibie Nomor 6 Tahun 1998 yang menghapus istilah pri dan non-pri sehingga tidak lagi digunakan dalam kebijakan resmi pemerintahan dan bisnis, juga dalam Keputusan Presiden Abdurachman Wahid, Nomor 6 Tahun 2000 yang menolak pembatasan praktek-praktek budaya dan tradisi Cina di tempat pribadi, sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memberikan etnis Cina Indonesia ruang sosial dan politik untuk mengekspresikan identitas budaya mereka.

Konsekuensi logis dari pemberian hak-hak tersebut, termasuk hak politik, dengan segera mendapatkan respon yang sangat antusias dari masyarakat Tionghoa dalam mengekspresikan hak-hak dan aspirasi politiknya, mulai dari bergabung dalam partai politik, membentuk Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, atau pun mendirikan partai-partai yang berbasis masyarakat Tionghoa tapi tidak dengan secara terbuka menggunakan nama Tionghoa seperti Partai Perhimpunan Indonesia, Partai Indonesia Baru, Partai Pembauran, dan Partai Binneka Tunggal Ika. Secara sederhana M. Reza Zaini, seorang antropolog UI, menggambarkan kegairahan partisipasi politik etnik Tionghoa setelah era

reformasi itu dengan menyajikan data keikutsertaan warga Tionghoa dalam pencalonan anggota legislatif dari tiap periode pemilu. Data menarik mengenai partisipasi Etnis Tionghoa pada Pemilu 1999 mencatat kurang dari 50 caleg Etnis Tionghoa, kemudian pada Pemilu 2004, setidaknya terdapat 150 caleg yang memiliki latar etnis Tionghoa. Sepuluh tahun kemudian, jumlah tersebut membengkak menjadi 700 caleg Etnis Tionghoa untuk DPR Pusat, DPRD, dan DPD di Pemilu 2014 (M. Reza; 2014). Sejak pemilu 2009 keberhasilan caleg etnis Tionghoa dalam memenangkan kursi pemilu legislatif baik lokal maupun nasional sangat signifikan. Kota-kota dan kabupaten seperti di Yogyakarta, Surakarta, Malang, Tuban, Semarang, Surabaya, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Singkawang, Kota Pontianak, Makassar, dan provinsi-provinsi Kalimantan Barat, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Gorontalo, adalah daerah-daerah yang para politisi Tionghoanya cukup berhasil memperoleh kursi di lembaga legislatif.

Seiring dengan pemilu legislatif tersebut, para politisi Tionghoa juga mulai mencoba peruntungan dalam kontestasi pemilu eksekutif atau kepala daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Papua yang memberlakukan undang-undang khusus di mana Kepala Daerah harus berasal dari rumpun ras Melanesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Diantara para politisi Tionghoa yang berhasil menduduki jabatan eksekutif terbentang dari Barat sampai Timur Indonesia, di antaranya adalah Walikota Pangkal Pinang, Belitung Timur, Kabupaten Kuningan, Kota Bitung, Kabupaten

Sitaro, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Malang, Kota Singkawang, Kabupaten Sula, Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, dan Wakil Gubernur Gorontalo (Lan; 2009).

Geliat partisipasi politik etnis Tionghoa juga ditandai dengan kemunculan tokoh Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanu, yang secara gigih dan serius membidani sebuah partai nasional inklusif Perindo-Partai Persatuan Indonesia, tahun 2015. Partai ini menurut survey yang dilakukan oleh CSIS pada bulan Agustus 2017, menempati urutan ke-5 tingkat elektabilitasnya setelah PDIP, Golkar, Demokrat, dan Nasdem, untuk memilih di kalangan generasi milenial, sehingga perkembangannya akan menjadi sangat signifikan pada 7-10 tahun yang akan datang (CSIS; 2017). Perindo sangat potensial menjadi partai inklusif pertama yang diinisiasi dan dikomandoi oleh etnis China yang mampu berperan dalam peredaran politik formal secara langsung di tingkat nasional jika mampu melalui ambang batas atau *'parliamentary threshold'* 4% pada pemilu 2019 yang akan datang. Dengan dukungan jaringan media yang dimilikinya yakni MNC Corporation, Global Mediacom dan MNC Media yang membawahi 6 stasiun televisi nasional dan lebih dari 20 TV channel, maka perolehan pemilu yang melampaui angka *'threshold'* itu, adalah sesuatu yang masuk akal.

Peluang Politik China-Muslim

Dari banyak bermunculannya etnis Tionghoa di kancah politik lokal maupun nasional di atas, baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif, dapat dilakukan pemilahan atau

kategorisasi berdasarkan agama yang mereka anut. Untuk kepentingan tulisan ini, maka penulis membaginya menjadi 2 yakni kelompok China-Muslim dan China-Non Muslim.

Jajaran nama-nama politisi Tionghoa seperti Ahok dan Basuri Cahaya Purnama (adik Ahok), Cornellis-Kalimantan Barat, Christiandi Sanjaya-Kalimantan Barat, Karolin Nathasa-Kabupaten Landak, Bong Sau Fan alias Hasan Karman-Singkawang, Tjhai Cui Mei-Singkawang, Fefy Leti-Pangkalpinang, Yansen-Sanggau, Bobby Jayanto-Kepri, Budiono Tan-Kalbar, merupakan sederet nama yang menjadi kepala daerah baik di kabupaten/kota yang mayoritas penduduknya muslim (Singkawang, Belitung Timur), maupun yang non muslim seperti di Landak dan Sanggau. Di deretan yang lain terdapat Hj. Hassan Abas Nusi alias Acan-Wagub Sulawesi Utara, Ir. H. Muchamad Anton, MM atau Abah Anton alias Goei Hing An-Walikota Malang Jawa Timur, dan H. Acep Purnama, S.H., M.H.-Bupati Kuningan Jawa Barat, yang mereka ini merupakan China-Muslim yang berhasil memenangkan pemilu di daerah yang mayoritas penduduknya adalah Non Muslim (Sulawesi Utara), maupun yang muslim (Kota Malang dan Kabupaten Kuningan) (Damis; 2010 dan Umar; 2017).

Jika dilihat dari fakta-fakta di atas maka tergambar jelas bahwa baik China-Non Muslim maupun China-Muslim sama-sama memiliki peluang untuk memenangkan kontestasi politik di tingkat lokal tanpa membedakan apakah masyarakat di daerah itu beragama mayoritas sama dengan sang kandidat kepala daerah yang ber-etnis China, maupun berbeda agama dengan mayoritas penduduknya.

Namun, apabila data-data itu dikelompokkan lagi menurut sebaran geografis yang membedakan antara pemilu lokal di Jawa dengan di luar Jawa, maka hasilnya adalah sebagai berikut; *pertama*, etnis China-Non Muslim dan etnis China-Muslim sama-sama memiliki peluang untuk memenangkan pilkada di luar pulau Jawa, seperti yang secara empirik terjadi Singkawang yang mayoritas penduduknya muslim dipimpin oleh Etnis China-Non Muslim (Muslim 80% dan Non Muslim 20%), Kabupaten Landak memiliki mayoritas penduduk beragama non muslim 84%, dan muslim 16% dipimpin oleh Etnis China-Non Muslim, Kabupaten Belitung Timur mayoritas penduduk beragama Islam 98% dan non muslim 2%, dipimpin oleh etnis China-Non Muslim, dan Provinsi Sulawesi Utara yang mayoritas penduduknya non muslim 70%, dan muslim 30%, dipimpin oleh Wakil Gubernur dari Etnis China-Muslim (Data Sensus Penduduk 2010). *Kedua*, di Pulau Jawa yang semua kabupaten dan kotanya mayoritas penduduknya beragama Islam, hasilnya tampak mencolok bedanya dengan di luar Jawa, yakni hanya kandidat dari Etnis China-Muslim saja yang berhasil memenangkan pilkada-pilkada di Jawa, seperti yang terjadi di Kota Malang Jawa Timur, dan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Kandidat etnis China-Non Muslim yang mencoba berkontestasi di Pulau Jawa sampai saat ini belum ada yang berhasil memenangkan pilkada Bupati/Walikota maupun Gubernur. Hal ini terjadi pada Pilkada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Calon wakil Bupati Goh Tjong Ping alias Teguh Prabowo gagal memenangkan pilkada Tuban tahun 2006 yang berakhir dengan kerusuhan dan huru-hara

massa yang paling buruk dalam sejarah pilkada di Pulau Jawa selama ini, yakni dengan aksi massa pimpinan Goh Tjong Ping yang membakar Kantor Bupati Tuban, Kantor KPUD Tuban, Kantor Pemerintahan Daerah Tuban, Kantor Sekretariat DPD Golkar Tuban, serta Hotel Mustika milik lawan politik yang memenangkan pilkada Haeni Relawati, Gudang 99 dan rumah pribadi juga milik keluarga Haeni. Demikian pula pilkada DKI Jakarta yang masih segar dalam ingatan masyarakat, Ahok gagal merebut kursi Gubernur meskipun sebelumnya dia menjadi wakil gubernur mewakili Joko Widodo. Pilkada ini pun diwarnai dengan hiruk pikuk demonstrasi yang cakupannya tidak hanya di DKI saja dan nyaris menguras energi kelompok umat Islam tertentu, yakni dengan mengerahkan demonstrasi yang terbesar sejak reformasi dengan jumlah peserta lebih dari 1 juta orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Paparan kontestasi etnis China-Muslim dan China-Non Muslim dalam memenangkan pilkada di berbagai daerah di atas dapat digambarkan dalam matriks di bawah ini:

	Luar Jawa	Jawa
China-Non Muslim	+	-
China-Muslim	+	+

Dari matrik ini terbaca bahwa secara umum, etnis China-Non Muslim hanya memiliki peluang untuk memenangkan pilkada di luar Pulau Jawa, sedangkan etnis China-Muslim memiliki keunggulan dengan memiliki peluang untuk menang pilkada baik di Pulau Jawa maupun di Luar Pulau

Jawa. Dalam konteks ini, diperlukan penjelasan khusus mengenai kemenangan Jokowi-Ahok pada pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012, di mana penentu kemenangan itu ada pada Jokowi sebagai Cagub dan bukan pada Ahok sebagai Cawagub. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan Jokowi sebagai presiden RI, namun sebaliknya, kekalahan Ahok pada pilkada 2017.

Jika gambaran sebagaimana terdapat dalam matriks tersebut dilihat dalam kaca mata sosiologi politik masyarakat Indonesia secara keseluruhan, di mana Jawa-Muslim masih mendominasi kelompok sosial di Indonesia, maka peluang China-Muslim untuk berkontestasi di tingkat nasional, katakanlah Pemilihan Presiden, sangat terbuka. Terbukanya peluang itu tentu mensyaratkan secara mutlak adanya kendaraan politik yang mampu menopang pencalonannya. Di sinilah, Partai seperti Partindo pimpinan Hary Tanoesoedibjo itu memiliki peran yang sangat strategis bagi kaum China-Muslim, sebab sebagai partai inklusif, interaksi dan tarik-menarik politik di dalamnya akan memerlukan para kader yang dapat mengisi ruang '*political intersection*' di antara aktifisnya, maupun mengisi kebutuhan pencalonan kepemimpinan nasional yang integratif dengan karakter sosiologis mayoritas penduduk Indonesia, yakni muslim.

Penutup

Kiprah dan keberanian etnis China untuk berkontestasi dalam pemilu lokal di Indonesia memberikan kesadaran tentang hadirnya aktor politik baru yang memiliki modal bertarung yang lebih siap, baik dari segi ekonomi maupun

network politik dan media. Sisi lemah mereka terletak pada modal sosial dalam arti relasi sosial atau integrasi dengan masyarakat Indonesia secara umum karena masih adanya stereotype yang diwarisi oleh sejarah Bangsa Indonesia.

Etnis China yang mampu menerobos batasan sosial itu adalah mereka yang memiliki sebagian dari ciri yang dimiliki oleh mayoritas penduduk Indonesia, yakni ke-musliman mereka. Jika dibandingkan antara etnis China-Muslim dengan China-Non Muslim, secara sosiologis empiris, kelompok China-Muslim lah yang lebih berpeluang untuk memenangkan kontestasi dengan menerobos batas-batas ciri masyarakat Indonesia itu. Di sinilah, etnis China-Muslim ini meskipun menjadi minoritasnya kaum minoritas China di Indonesia, sesungguhnya memiliki potensi politik yang sangat strategis.

Referensi

- Data Statistik 2010, Biro Pusat Statistik, Jakarta
- Setiawan, Teguh, 2012, *'Cina Muslim dan Runtuhnya Republik Bisnis'*, ISBN: 978-602-7579-11-8, Republika, Jakarta
- CSIS, Survey Politik, Agustus 2017, <https://news.detik.com/berita/3712261/survei-csis-elektabilitas-pdip-teratas-dimilenial-perindo-meroket>
- Damis, Mahyudin, 2010, 'Kepala Daerah dan Warga Keturunan Tionghoa', <https://mahyudindamis.wordpress.com/2010/05/18/kepala-daerah-dan-warga-keturunan-tionghoa/>

Thung Ju Lan, 2009, 'Catatan Tentang Orang Cina Indonesia dalam Politik Lokal', LIPI, <https://kyotoreview.org/issue-11/catatan-tentang-orang-cina-indonesia-dalam-politik-lokal/>

Umar, Ridwan, 2017, 'Inilah Politisi Etnis China Yang Menjadi Kepala Daerah', <https://nusantara.news/inilah-politisi-etnis-china-yang-menjadi-kepala-daerah/>

Zaini, M. Reza, 2014, 'Pemilu & Etnis Tionghoa: Dari Partai Tionghoa Indonesia hingga Reformasi', https://www.kompasiana.com/m.rezazaini/pemilu-etnis-tionghoa-dari-partai-tionghoa-indonesia-hingga-reformasi_54f79969a333119e778b473e

BUNGA RAMPAI

CINA DAN INDONESIA DALAM DINAMIKA POLITIK GLOBAL KONTEMPORER

Cina dan Indonesia semakin diperhitungkan dalam panggung ekonomi-politik global. Kedua negara ini, sama-sama memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi pemain penting. Meski begitu, tantangan yang dihadapi kedua negara juga tak kalah pelik. Jumlah penduduk yang sangat padat, area geografis yang luas, di satu sisi menjadi determinan penting bagi kedua negara. Namun jika tidak ditangani oleh kapasitas politik yang memadai, faktor tersebut akan menjadi penghambat kemajuan. Buku ini berisi tulisan para dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta setelah melakukan kunjungan akademik ke China. Ada banyak topik yang dibahas dalam buku ini, yang disesuaikan dengan perspektif, minat kajian serta gaya ungkap para dosen dalam menyajikan gagasan.



ISBN: 978-602-6941-25-1



9 786026 941251